
INDONESIA NET ZERO SUMMIT 2023

“It’s Now or Never!”

Sabtu, 24 Juni 2023

Djakarta Theater XXI

“Rembuk Kebangsaan untuk Iklim”

Dr. Dino Patti Djalal, Moderator:

Perubahan iklim, bukan bangsa Indonesia yang memulai. Ini dimulai di dunia Barat. Tapi, solusinya, tidak bisa kita meminta bangsa Barat untuk menyelesaikannya. Sekalipun mereka menurunkan emisi di sana menjadi 0, percayalah, masalah iklim akan tetap menghantui kita. Solusinya harus dihitung bersama-sama. Kalau kita menghemat emisi beberapa juta ton, secara global berarti dunia pun menghemat beberapa juta ton yang dihemat Indonesia. Tetapi jika kita menambah emisi, 100 juta ton atau berapa pun, berarti dunia juga menambah emisi.

Semua hal ini menjadi pikulan bagi kita. Emisi tidak hanya terjadi di Indonesia, Amerika, atau Tiongkok. Saya sebagai mantan diplomat selama 28 tahun tidak pernah melihat isu seperti ini. Isu ini benar-benar unik, baik dari masalah, solusi, hingga *how do we get there*.

Saya ingin tanya. Apakah penting bagi para pemimpin Indonesia yang nanti akan melakukan kontestasi politik tahun 2024 — siapa pun dia, dan di level apa pun, mulai dari presiden hingga lokal — untuk mempunyai visi dan pandangan mengenai iklim? Kedua, *does that mean* kalau nanti Anda memilih di tahun 2024 berarti kita harus tahu posisinya mengenai berbagai hal, termasuk juga mengenai perubahan iklim? Benar atau tidak?

Ambisi FPCI hanya satu yang terpenting hari ini, yaitu kita ingin membangun wawasan masyarakat mengenai perubahan iklim dan kita juga ingin para pemimpin kita mempunyai posisi yang bisa kita cek dan verifikasi mengenai iklim. Tidak bisa dia bilang, *“saya tidak paham.”* Tidak mungkin. Dulu di tahun 2019 atau 2014 mungkin bisa, tapi sekarang tidak bisa. Salah satu tujuan kita adalah agar semua orang yang mempunyai ambisi politik untuk mempunyai pandangan iklim.

Dari pembicara-pembicara yang hadir dalam acara hari ini, membuktikan bahwa FPCI adalah lembaga netral, non-politis, dan merangkul semua pihak. Kita bekerja sama dengan semua kepentingan dan partai politik. Dengan hormat, saya ingin mengundang sahabat saya bapak Ketua KPU. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua KPU, Pak Hasyim Asy'ari.

Opening Remarks

Hasyim Asy'ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Isu tentang perubahan iklim menjadi salah satu topik yang penting untuk kita bicarakan bersama-sama, terutama kita ingin mendengarkan berbagai pandangan dan komitmen para pimpinan nasional dan partai politik yang mempunyai potensi untuk dicalonkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden untuk Pemilu Indonesia 2024.

Saya merupakan orang asli Kudus. Pernah kita mendengar kabar ada proyek pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di sekitar Jepara, Kudus, dan Gunung Muria. Memang ini penting, karena ini bisa jadi salah satu alternatif untuk mencapai *zero carbon*. Tapi yang kemudian membuat orang ragu adalah soal kecermatan kita, sehingga apabila situasinya benar-benar bagus, namun di kemudian hari dikabarkan — meskipun secara faktual belum tentu terjadi — dikabarkan retak atau bocor, yang berakibat terhadap ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan akan kemungkinan terjadinya radiasi. Hal itu berakibat terhadap tidak lakunya produk makanan di sekitar Kudus dan furnitur di Kudus karena “dikabarkan” terkena radiasi. Ini baru “kabar”.

Kedua, hari-hari ini saya sering melintasi Pantura, Jawa Tengah, mulai dari Kudus, Demak, Semarang, Pekalongan, sampai Jakarta. Saat saya masih duduk di bangku sekolah SMA sekitar tahun 1989, sudah ada kabar bahwa Kota Semarang mengalami abrasi air laut yang telah memasuki rongga-rongga tanah sampai di Simpang Lima. Sekarang ini bisa kita lihat di Pantura, mulai dari Demak, Pekalongan, dan Jakarta, air rob — permukaan air laut — mengalami kenaikan. Kalau air laut naik, maka air di darat tidak bisa mengalir ke laut. Apa yang terjadi? Banjir, genangan di luar musim hujan. Pertanyaannya adalah kenapa air laut ini bisa naik ke daratan dan menjadi salah satu ancaman kehidupan? Bisa jadi hal tersebut dikarenakan oleh faktor domestik atau lokal di Indonesia, serta faktor global, seperti mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan yang mengakibatkan volume air laut meningkat. Ini menunjukkan bahwa situasi di lokal atau daerah kita bisa dipengaruhi oleh situasi global, dan demikian pula sebaliknya. Situasi daerah dan nasional kita bisa berpengaruh terhadap situasi global, terutama dalam perubahan cuaca.

Ketiga, masih dalam pekan ini. Ini bulan Juni. Kalau situasi normal, musim kemarau di Indonesia hitungannya adalah antara bulan April sampai Oktober, sedangkan musim hujan dalam situasi normal dimulai dari bulan Oktober sampai Maret. Akan tetapi, sekarang sudah menginjak bulan Juni dan masih sering terjadi hujan deras, petir, dan angin. Apakah ini situasi khusus atau fenomena yang sering terjadi yang tidak bisa diprediksi situasi iklimnya?

Sama halnya untuk anak-anak muda di sini. Apa masih sering membaca astrologi? Masihkah kalian percaya perbintangan seperti *zodiac*, seperti Pisces dan Taurus? Padahal dalam ilmu asli astronomi, rasi bintang telah bergeser. Peruntungan nasib dan sebagainya bisa saja mengalami pergeseran. Maka dari itu, bagi kita semua, terutama anak-anak muda, mengikuti perkembangan bukan hanya berpatokan pada astrologi, tetapi juga berpatokan pada astronomi. Di zaman dulu ketika nelayan ingin menangkap ikan atau ketika petani ingin menanam padi, ilmu perbintangan masih menjadi patokan. Apabila sekarang iklim telah bergeser, apa yang bisa dijadikan patokan?

Saya kira forum ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita mendengarkan pandangan-pandangan, visi-misi, dan terutama komitmen para pemimpin nasional yang mempunyai potensi menjadi presiden atau wakil presiden dari hasil Pemilu 2024. Contoh yang paling mudah adalah adanya Undang-Undang tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen antara para pemimpin tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan situasi alam kita yang dipergunakan untuk konservasi, reservasi air, dan sebagainya, tetap terjaga. Itu akan terbukti dan menjadi kenyataan jika menjadi pilihan-pilihan kebijakan para pemimpin nasional kita dari hasil Pemilu dan Pilkada 2024. Maka dari itu, saya mengajak para pimpinan nasional yang akan menjadi panelis dan teman-teman sekalian

sebagai pemilih untuk Pemilu 2024 agar komitmen dalam menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk kehidupan kita. Sebagai manusia di Bumi, kita mulai dari diri kita masing-masing dan juga harus dimulai dari para pemimpin kita.

Dr. Dino Patti Djalal, Moderator:

Mungkin saya mulai dari Pak Airlangga dulu. Saya ingin bertanya mengenai visi Indonesia Emas 2045. Yang kita khawatirkan di sini adalah jika visi tersebut terancam, Bumi akan mengalami kenaikan suhu sebesar 3-4°C, yang mana hal tersebut berada di luar kendali Indonesia — walaupun kita turut berkontribusi. Apa yang Pak Airlangga bisa sampaikan mengenai visi Indonesia 2045 agar kita bisa selamat sampai ke visi itu? Pertanyaan yang sama akan saya sampaikan pula kepada Mas Agus dan Pak Bima Arya. Silakan, Pak.

Airlangga Hartarto, Panelist:

Terima kasih. Pertama, visi ini penting karena ini adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Dalam menuju 100 tahun Indonesia merdeka, yang paling penting adalah tahun 2025 sampai dengan tahun 2035. Kenapa ini paling penting? Karena di tahun 2024 diadakan Pemilu. Pemilu menentukan siapa pemimpin kita. Pemimpin kita menentukan visi ke depan. Sebelum kita sampai ke 2045, 2025 dan 2035 menjadi sangat penting. Ini adalah waktunya para pemuda dan mahasiswa, karena Indonesia memasuki era bonus demografi. Bonus demografi hanya terjadi selama 13 tahun sampai 2038. Sebuah peradaban dan bangsa hanya satu kali mendapatkan bonus demografi. Indonesia akan berhenti bonus demografi pada tahun 2038, yang berarti usia di bawah 17 tahun dan usia di atas 60 tahun lebih rendah dari usia produktif. Tidak banyak negara di dunia ataupun di Asia yang lolos. Di ASEAN pun hanya Singapura. Salah satu yang lain juga Korea Selatan.

Penting bagi Indonesia — untuk menuju 2045 — di mana di tahun tersebut diharapkan *income* kita mencapai 20 ribu dolar AS, tetapi di 2035 mencapai 12 ribu dolar AS. Hal tersebut menjadi momen krusial yang harus kita kuasai. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan fundamental, yakni usia produktif harus bisa bekerja. Negara lain di Asia adalah contohnya — ketika mendapatkan bonus demografi dan mereka tidak dapat, akibatnya lulusan S2 pun menjadi tukang sapu. Ini yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, kita ingin agar generasi muda ada tiga hal. Pertama, bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah memberikan bansos. Masyarakat yang mampu dan berpendidikan diharapkan memperoleh pekerjaan yang baik. Di samping itu, kita mendorong agar *entrepreneurs* atau wiraswasta kita tumbuh. Kita berkeinginan menjadi negara maju, tetapi jumlah *entrepreneurs* kita hanya 3%. Kita harus menaikkan angka tersebut menjadi 5%. Kemudian kita harus menjaga sumber daya manusia kita sehat, berpendidikan, dan mempunyai inovasi.

Berikutnya, tentu kita bicara terkait *sustainability*. *Sustainability* berarti berbicara mengenai kemaritiman. Kita harus menguasai *blue economy*. Kita juga adalah negara yang mendorong *sustainability* yang artinya mendorong *green economy* dan Indonesia sudah *committed* di 2060 mencapai *net-zero emissions*. Dalam 10 tahun ke depan, kita akan mengembangkan energi berbasis hijau. Pada saat G20, Amerika dan EU serta G7 di Hiroshima *committed* 600 miliar dolar AS, di mana 300 miliar dolar AS tersebut berasal dari EU untuk *green economy*. Jepang memberikan *Just Energy Transition Partnership* dan menyiapkan dana 20 miliar dolar AS. Kita sedang membahas program implementasi, salah satunya adalah pengembangan *hydropower*, di mana di Kaltara (Kalimantan Utara) akan dibangun 10 GW / 10.000 MW. Setiap GW yang

dihasilkan dari Kalimantan Timur akan ditukar dengan pembangkit yang berbasis batu bara. Itu merupakan komitmen pemerintah ke depan.

Selain itu pemerintah juga *committed* untuk membangun *food estate*, karena kita tidak ingin dengan adanya *climate change*, La Niña, dan kekeringan, kita tidak mempunyai pangan. Untuk menjadi negara maju, perut harus kenyang dan kita harus siap untuk mempersiapkan pangan untuk bangsa sendiri. Ini menjadi tantangan kita. Sekarang Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi terbaik; kita kedua terbaik di G20. Tingkat inflasi kita juga salah satu yang terendah di dunia.

Bicara soal kesehatan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa status pandemi Covid-19 berakhir pada tanggal 21 Juni 2023. Indonesia menempati nomor 5 terbaik di dunia dalam penanganan Covid-19. Demikian, terima kasih.

Dr. Dino Patti Djalal, Moderator:

Terima kasih. Saya ingin mendengar pandangan dan pertanyaan dari para peserta yang ada di sini. Jadi persiapkan diri kalian bagi yang ingin bertanya untuk mengambil tempat di depan mikrofon dalam waktu 15 menit lagi.

Next, Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus Harimurti Yudhoyono, Panelist:

Saya melihat bahwa Indonesia pada tahun 2045 *promising*, dengan banyak catatan, tentunya. Para *founding fathers* kita telah menetapkan tujuan berbangsa, kemudian Indonesia mengalami jatuh-bangun bangsa, hingga pada hari ini kita patut bersyukur dan mengapresiasi segala pencapaian oleh para pemimpin dan generasi sebelum kita. Setiap pemimpin mempunyai masanya, setiap masa mempunyai pemimpinnya. Generasi hari ini pun juga mempunyai harapan dan peluang, ujian, dan tantangan yang khas. Oleh karena itu mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Kita berharap, Indonesia di tahun 2045 semakin aman dan damai. Terbebas dari segala ancaman, baik militer maupun non militer. Internal maupun eksternal. Kita rukun bersatu menjaga *unity* dan *diversity* dengan baik.

Kita juga ingin Indonesia semakin adil dan sejahtera. Ekonomi kita harus semakin kuat, paling tidak mencapai 10 besar terbaik di dunia. Disertai pula dengan *income* per kapita meningkat, yang berarti masyarakat semakin sejahtera. Kita tidak senang tentunya apabila orang kaya semakin kaya, sedangkan masih banyak yang tertinggal di bawah. Kita ingin maju, tumbuh, dan sejahtera bersama. Itu adil. *Injustice is the mother of all problems*, termasuk *social and economic disparities*. Yang terakhir kita tentunya ingin menjadi negara yang maju dan mendunia. Peradaban kita juga maju berbasis pada *science* and *technology*. Kita harus menjadi bangsa yang produktif.

Tadi Pak Airlangga berkata bahwa beliau bersyukur akan adanya bonus demografi di Indonesia. Pertanyaannya bukan pada jumlah, namun pada kualitas. Apakah kita mempunyai *skills*, kapasitas, dan juga keberanian untuk mendapatkan segala peluang di abad 21? Mendunia karena kita ingin dihormati dan disegani, karena kita berkontribusi, termasuk berperan aktif dan memimpin, bukan hanya di kawasan saja tapi juga di dunia internasional, dalam hal-hal yang berkaitan dengan *peace keeping*, menjaga *stability*, *natural disaster relief*, termasuk menjaga planet ini. Kita harus mencegah agar dampak *global*

warming dan *climate crisis* tidak menghantam kita semua. Banyak hal yang bisa mengancam eksistensi Indonesia dan masa depan kita di tahun 2045. Tentu di sesi berikutnya, saya yakin akan ada pembicaraan yang lebih dalam lagi soal apa yang menjadi dampak dan mengapa kita harus siap memitigasi hal-hal tersebut. Tapi yang jelas, saya termasuk orang yang optimistis dan berprasangka baik terhadap masa depan bangsa Indonesia. Kita harus bersatu dan siap menghadapi segala tantangan yang ada, termasuk dampak buruk dari *climate crisis* dan *global warming*. Terima kasih.

Bima Arya, Panelist:

Narasi 2045 gencar disuarakan, mulai dari Presiden Joko Widodo, para menteri, gubernur, dan bupati, hingga lurah dan ketua RT bicara soal Indonesia 2045. Pak Airlangga dan tim dengan sangat luar biasa membawa Indonesia hari ini dengan angka-angka yang *impressive*, menjadi satu dari 20 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia, bahkan nomor dua yang terbaik. Tapi apakah kita pernah berbicara dengan serius. Hari ini kita OK dan kita *perform*. Pak Airlangga dengan jajaran menteri sampai bupati/walikota dan gubernur konsolidasi setiap hari Senin. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menjadi Menteri Koordinator di tahun 2045? Siapa yang akan menjadi Ketua Umum Demokrat di tahun 2045? Siapa yang akan menjadi Wali Kota Bogor di tahun 2045? Sejauh mana kita siapkan kepemimpinan di tahun 2045? Siapa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah yang saat ini berada di depan kami, yaitu Anda sekalian, Gen Z. Kita harus mempersiapkan teman-teman yang sekarang *concern* akan hal itu. Sejauh mana kita *concern* dengan *leadership talent* untuk pemimpin Indonesia di tahun 2045? Apabila saat ini kita *perform* namun kita lengah, maka kita akan berakhir seperti Afrika Selatan dan Brazil yang gagal dalam memanfaatkan bonus demografi.

Survey menunjukkan pada tahun 2021, semakin muda generasi tersebut, maka semakin *concern* mereka tentang isu-isu *climate change*. Gen Z yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 lebih *concern* terhadap isu ini dibandingkan Gen X dan Gen Y, apalagi *baby boomer*. Berdasarkan survey, mereka ingin pemerintah melakukan aksi cepat untuk mengatasi banjir, sampah, dan lain-lain. Pertanyaannya, sejauh mana ketua umum berbagai partai politik di Indonesia *concern* dengan isu ini? Sejauh mana isu ini dibawakan oleh para caleg (calon legislatif) atau calon pemimpin daerah untuk melibatkan anak-anak muda? Terima kasih.

Dr. Dino Patti Djalal, Moderator:

Terima kasih. Saya ingin melihat orang-orang yang ingin bertanya.

Concern dari kami sebagai komunitas adalah walaupun 191 negara telah mengajukan target *net-zero*, tapi sebagian besar negara-negara tersebut tidak mempunyai strategi, uang, dan tidak mempunyai undang-undang terkait hal tersebut. Semoga ini menjadi suatu hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah dan DPR agar *net-zero* harus dilengkapi dengan strategi dan pembiayaan yang konkrit, sehingga menjadi kewajiban bagi siapa pun yang akan memimpin Indonesia ke depan.

Q&A SESSION

Amadea Sudirini, Politeknik Statistika STIS:

Garis merah yang saya temukan dari berbagai pendapat dari setiap *panelist* adalah untuk tahun 2045, yang paling penting adalah perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dari berbagai aspek. Tapi salah

satu urgensi terkait *climate crisis* adalah *we don't have 2045*. Kita tidak mempunyai waktu selama itu. Jadi sebagai *policy maker, step urgent* apa yang akan dilakukan dan diimplementasikan untuk memperpanjang waktu itu, sehingga kami Generasi Z yang akan menjadi *policy maker* setelah bonus demografi nanti mempunyai kesempatan untuk itu? Karena tidak akan berguna apabila Indonesia mempunyai bonus demografi namun *we don't have time due to the climate crisis*. Thank you.

Hadi Wijaya, publik:

Tantangan Indonesia di tahun 2045 semakin berat. Kita tidak mempunyai banyak waktu untuk berleha-leha karena sekarang masalah iklim sudah kita rasakan. Sebelumnya Ketua KPU pernah *mention* bahwa saat ini ketika musim hujan dan musim kemarau mempunyai siklus yang tidak beraturan. Lalu apa yang Bapak-Bapak di depan ingin lakukan ketika mungkin suatu saat nanti menjadi pemimpin Indonesia? Langkah konkrit apa yang bisa dilakukan untuk merubah iklim Indonesia menjadi lebih baik? Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan seringkali berdampak terhadap iklim Indonesia. Apa langkah konkrit yang kita butuhkan untuk perubahan iklim di Indonesia? Terima kasih.

David, Universitas Jenderal Soedirman:

Bagi Bapak-Bapak di depan, bagaimana pemerintah pusat yang akan datang bisa mendukung ide keberlanjutan alam mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga ke akar rumput, di saat pemegang-pemegang kebijakan memiliki keterkaitan dengan aktor-aktor yang menyebabkan isu-isu lingkungan? Terima kasih.

Widyanata Joshuadinata, publik:

Selamat sore. Pertanyaan saya cukup *simple*. Kita tahu bahwa *climate change* dapat kita lawan bersama-sama dengan kolaborasi bersama negara-negara lain. Bagaimana Bapak sebagai pemimpin di masa depan akan merumuskan kebijakan untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain tanpa meninggalkan kepentingan negara? Terima kasih.

Andhyta F. Utami, Think Policy Indonesia:

Selamat sore. Banyak pembuat kebijakan atau *decision makers* yang merasa bahwa mereka terbelenggu dalam membuat keputusan. *They know what's right* untuk dilakukan karena mereka sudah memahami *science* soal itu, namun merasa terbelenggu yang menyebabkan mereka tetap melakukan *business as usual* dikarenakan oleh sistem, insentif politik, ekonomi, dan sebagainya.

Setelah Bapak terpapar dengan fakta *science* di balik krisis iklim, *what have you done differently? Have you done anything different* sejak Bapak tahu bahwa pembangkit batu bara sebenarnya sangat tidak sehat, membahayakan masa depan kita, dan bahwa kita harus mengelola hutan dengan lebih baik? Apakah pengetahuan itu digunakan dalam pembuatan kebijakan selama ini? Terima kasih banyak.

Airlangga Hartarto, Panelis:

Terima kasih. Saya percaya teknologi dapat menyelesaikan masalah, selama teknologi itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. *I'm an engineer, that's why I believe in technology*. Dulu kita percaya bahwa teknologi nuklir berbahaya, tetapi sekarang kita bicara soal *small modular reactor, 80 MW*. Nuklir adalah salah satu yang *sustain* dan *cost*-nya murah. Kita sedang bicara dengan AS, Jepang, dan Korea. Kedua, kita percaya bahwa Revolusi Industri II didorong oleh penggunaan batu bara, *steam engine*, dan

kereta api. Sekarang kita masuk dalam Revolusi Industri IV. Eropa sudah tidak memproduksi batu bara lagi, tetapi kita mempunyai batu bara yang merupakan energi paling murah.

Apa yang akan dilakukan Indonesia? Tentunya penggunaan teknologi. Sekarang di Jepang didorong pembakaran menggunakan amonia. Indonesia juga merupakan negara penghasil minyak, sehingga kita mempunyai lubang atau kantong di bawah tanah untuk menyerap karbon. Jadi kita adalah *the largest carbon capture* dan *carbon storage* yang ada. Kita bisa mengambil karbon lalu diinjeksi ke bumi. Sekarang kita sedang membuat prototipe dengan Chevron dan Exxon dengan perkiraan biaya 50 dolar AS/ton. Kemudian kita mengembangkan *carbon market*. Harga karbon di Eropa saat ini mencapai 100 Euro/ton. Bayangkan di Indonesia, yang tidak mengerti atau tidak mengetahui informasi, karbon Indonesia diberi harga 5 dolar AS/ton oleh kuasi multinasional. Ini yang kita dorong. Jangan sampai negara lain mengambil karbon Indonesia untuk *carbon credit* mereka dan kita dibayar murah. Hal ini yang kita hindari. Maka dari itu pemerintah mendorong *market* untuk karbon melalui *stock exchange*, sehingga *carbon* kita betul-betul dihargai setara dengan yang ada di Eropa. Ini yang harus kita jaga.

Satu pesan lagi dari saya. Dunia merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari kita. Kita dianggap sebagai negara yang 'lebih rendah'. Kita punya standar untuk kayu dan *furniture*, yaitu SVLK, yang dianggap tidak baik *traceability*-nya. Kita sedang bicara di Eropa — *EU Deforestation Act*. Komoditas yang dianggap bermasalah di antaranya yaitu kopi, kakao, karet, CPO (*Crude Palm Oil*), serta *timber* atau furnitur. Mereka menerapkan sebuah standar yang dianggap lebih tinggi, bahkan mereka mau mengatur negara lain. Kebijakan tersebut tidak menguntungkan rakyat, tetapi menguntungkan *multinational corporation*. Hal-hal seperti ini yang harus kita lawan dan harus kita ketahui. Kita tahu bahwa komoditas-komoditas yang kita miliki sudah diperdagangkan dan diekspor dari Indonesia sejak abad 16. Kenapa 5 abad setelahnya mereka baru meribut? Kita sebut ini sebagai *the new imperialism by regulation* yang dipaksakan pada negara lain. Terima kasih.

Agus Harimurti Yudhoyono, Panelis:

Saya tentu sepekat dengan apa yang telah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin dan para pengambil keputusan karena memang masalahnya kompleks dan ada paradoks di sana-sini. Yang jelas kita berharap bahwa kebijakan dan regulasi yang dilahirkan dalam iklim yang demokratis berpihak kepada lingkungan dan iklim. Jangan hanya di atas kertas, harus konsisten antara kebijakan, regulasi, dan implementasinya. Misalnya, Undang-Undang Minerba (Pertambangan Mineral dan Batubara), Undang-Undang Cipta Kerja, dan proyek *food estate*. Itu semua mempunyai tujuan yang bagus, tetapi ada hal-hal yang bisa diperbaiki dan harus segera dilakukan.

Tentu tugas *check and balances* adalah memberikan masukan dan *feedback* yang harus kita dengarkan. Partai politik mempunyai peran yang strategis; kita punya struktur partai, anggota di parlemen, dan kepala-kepala daerah. Tentu kita harus berkolaborasi dengan para *civil society*, NGO, LSM aktivis, dan semua pihak yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap Bumi kita.

Saya menghormati teman-teman sekalian yang tidak pernah lelah dan tidak selalu tampil di media, namun selalu bekerja keras untuk meyakinkan terjadinya transisi energi menjadi energi yang terbarukan. Kita tahu itu bukan hal yang mudah. Apabila harus memilih yang mana didahulukan, apakah pertumbuhan

ekonomi atau mengatasi *global warming*? Harapannya adalah kita tidak bisa memilih atau tidak harus memilih, tetapi kita harus memiliki *good will*. *Good will* harus datang dari *top leadership*, dari presiden, kepala daerah, hingga para pejabat di tingkat lokal. Karena ini bukan pekerjaan orang per orang atau komunitas saja, harus ada *good will* yang dijalankan secara konsisten.

Masyarakat tidak bisa diharapkan untuk memiliki rasionalitas yang serupa, itu mengapa penting bagi kita untuk membangun literasi. Kita harus meyakinkan untuk masyarakat memiliki kesejahteraan yang cukup, sehingga mereka mempunyai kesadaran dan kepedulian untuk hal-hal lain, termasuk mitigasi *climate crisis*. Bukan hal etis apabila politisi berbicara dan menyerukan soal lingkungan kepada masyarakat miskin dan termarginalkan, sedangkan kita tidak bisa memenuhi kesejahteraannya.

Kita pun juga tidak boleh pasrah dan menyerah begitu saja karena *time is ticking*, kita tidak mempunyai banyak waktu, dan kita seharusnya mengetahui bahwa kita mempunyai target penurunan emisi 45% hingga tahun 2030. Namun alih-alih terjadi, justru emisi meningkat 11%. Bagaimana kita mau mencapai *net-zero* di 2050? Walaupun Indonesia mempunyai komitmen di tahun 2060.

COP-26 dan COP-27 membuktikan bahwa bangsa-bangsa di dunia tidak dalam satu semangat yang sama ketika semua mempunyai *national interest*, namun bicara soal Bumi, artinya itu menjadi *survival interest* dari seluruh bangsa di dunia. Kita harus menjadi bagian dari itu semua. Saya berharap bahwa transisi ekonomi dan dekarbonisasi menjadi semakin agresif dan progresif disertai dengan membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat bersama dalam misi besar ini. *This is very ambitious* dan bukankah kita harus ambisius untuk Bumi kita? Tidak ada Bumi kedua. Sehebat apapun teknologi, tidak bisa menciptakan Bumi kedua. Jika dunia membangun *strong partnership* dan *cooperation*, serta saling membantu *technologically or financially*, maka mudah-mudahan ini menjadi lebih adil. Jangan sampai orang miskin menanggung beban dari perilaku orang kaya. Negara-negara berkembang tidak boleh menanggung beban yang disebabkan oleh negara-negara terdahulu yang lebih maju. Kita mempunyai hak untuk maju, tumbuh, dan sejahtera, tetapi tentu tidak boleh *at the expense of our planet*. Semoga FPCI dapat terus menyuarakan ini, kita bergandengan tangan, dan saya juga siap berkolaborasi dengan FPCI untuk terus mengkampanyekan hal ini. Terima kasih.

Bima Arya, Panelis:

Target *net-zero emission* 2060 bukan hal yang mudah dilakukan, apalagi Pak Luhut Pandjaitan sangat ambisius menyatakan bahwa 2050 *is too late*. Menurut saya *business as usual* tidak mungkin tercapai dengan cara biasa. Pemimpin yang mempunyai beban tidak mungkin menciptakan perubahan. Persoalan di Indonesia adalah banyak pemimpin yang memiliki beban masa lalu. Menuju walikota/bupati/gubernur/presiden, tapi tersandera oleh kepentingan *corporate* dan pemodal. Tanda tangan dia tidak akan *powerful* ketika kebijakannya dibatasi oleh kepentingan itu. Jadi nomor satu adalah *political will* dan komitmen yang tanpa beban masa lalu. Kedua, tanda tangan, keputusan, dan kebijaksanaan kita adalah perubahan yang ingin kita ciptakan. Tanpa dituangkan melalui kebijakan yang efektif, target-target kita tidak akan tercapai. Itu harus *integrated* dan konsisten. Tidak bisa KLHK semangat tanpa didukung oleh Kementerian Keuangan. Kita tidak bisa bicara soal *net-zero emission* di saat impor motor dan sebagainya terus dibuka. Kita juga tidak bisa komitmen anggaran dalam jumlah yang kecil. Data menunjukkan bahwa rata-rata alokasi APBD di 514 kota dan kabupaten hanya 0,5% untuk pengelolaan sampah. Padahal 75% sampah tersebut dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

dan 15% sampah didaur ulang. Tidak bisa, harus ada komitmen anggaran. Selama pemerintah tidak serius dalam mengalokasi anggaran, *nonsense* bicara *net-zero emissions* di 2060.

Ketiga, pemimpin harus terbuka. *It is the era of penta helix. It is the era of collaboration.* Tidak boleh sok tahu dan tidak bisa tertutup. Buka kolaborasi dengan komunitas kreatif, terbuka dengan *NGO* yang sangat ekstrem terhadap lingkungan hidup. Di Bogor, kita buka semua gagasan sehingga sampah plastik menjadi *paving*, serta botol mineral menjadi pulsa. Bogor melibatkan semua pihak sehingga penghargaan Adipura berhasil diraih setelah 28 tahun. Dengan *political will*, komitmen, semua kebijakan yang *integrated*, dan kolaborasi dengan semua pihak, *insha Allah* target tercapai.